

PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK

Ida Ayu Trisna Yudi Asri¹
Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email : idaayutrisnayudiasri@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penggunaan *self assessment system* di Indonesia dapat memberi keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi penghasilan kena pajak seminimal mungkin. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajaknya dengan hati-hati untuk mengambil kesempatan dari *loopholes* ketentuan hukum pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* maka didapatkan 159 sampel sebagai amatan penelitian. Data dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil membuktikan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, ukuran perusahaan

ABSTRACT

The use of self assessment system in Indonesia to deliver benefits taxpayer to calculate the taxable income to minimum. One of the actions taken by taxpayers to reducing or minimizing duty tax carefully to take advantage loopholes of tax law. This research has a purpose analyzed and verify about proportion of independent directors, presence of audit committee, executive risk preferences and firm size on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2013. The sample is determined by utilizing purposive sampling technique therefore as many as 159 of observation sample was obtained. The data observed with multiple linear regression analysis method. Results show that presence of audit committee, executive risk preferences and firm size has effect on tax avoidance. While proportion of independent directors did not has effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, proportion of independent directors, presence of audit committee, executive risk preferences, firm size

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberi wewenang dan kewajiban pada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajaknya melalui *self assessment system* yang diterapkan. Penggunaan *self assessment system* di Indonesia dapat memberi keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Pembebanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari pengabdian kewajiban dan partisipasi wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara. Namun, pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela tetapi iuran yang dapat dipaksakan sehingga kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan (Zain, 2005: 43).

Fenomena mengenai pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2013 yang ditunjukkan pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013
Efektivitas Pemungutan Pajak	99,4%	96,4%	93,8%
Target	Rp 879 Triliun	Rp 1016 Triliun	Rp 148 Triliun
Realisasi	Rp 874 Triliun	Rp 981 Triliun	Rp 1077 Triliun

Sumber: www.economy.okezone.com

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada otoritas pajak.

Dalam penelitian ini, konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Adanya penyetoran sebesar-besarnya dari penerimaan pajak diinginkan oleh fiskus sedangkan laba yang signifikan dengan biaya pajak yang minimum diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan (Prakosa, 2014). Konflik ini dapat terjadi karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang ditanggung dapat dikurangi.

Corporate governance tentunya sudah diterapkan oleh para perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komitisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Maria dan Kurniasih,

2013). Adanya komisaris independen didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Para komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Sartori, 2008). Beberapa studi sebelumnya membuktikan bahwa adanya komisaris independen dalam perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Berdasarkan teori keagenan semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku *oportunistik* manajer yang mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan (Raharjo dan Daljono, 2014).

Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal

tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak selain dua karakteristik *corporate governance* tersebut. Menurut Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Ini dikarenakan eksekutif sebagai *agent* perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan utilitas para *stakeholders* melalui keputusan yang diambilnya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Rego dan Wilson (2009) menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin besar perusahaan mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi menjadi lebih kompleks. Ini

mengakibatkan perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap transaksinya demi usaha penghindaran pajak.

Perusahaan manufaktur digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, diharapkan akan memberi gambaran yang representatif tentang praktik penghindaran pajak yang terjadi selama ini. Pemilihan perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan perpajakan, perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pendapatan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan serta perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani dan Endang, 2014).

Berdasarkan penjabaran tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis. Aspek teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi ilmu pengetahuan dan informasi tambahan tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan beberapa variabel yang memengaruhinya yaitu proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko

eksekutif dan ukuran perusahaan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam memutuskan dan menetapkan peraturan perpajakan yang tidak memihak serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Bagi perusahaan khususnya perusahaan manufaktur, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi administrasi pajak dan persepsi yang buruk kepada perusahaan.

Teori keagenan dapat memecahkan dua masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan. Permasalahan hubungan keagenan yang pertama muncul saat tujuan dari *principal* dan *agent* berbeda serta *principal* mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh *agent*. Yang kedua adalah pembagian risiko yang muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai pandangan yang berlainan pada risiko. Permasalahan disini adalah *principal* dan *agent* dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya preferensi risiko yang berbeda. Pihak *principal* maupun *agent* mempunyai kepentingan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi internal perusahaan dimiliki oleh *principal* sebagai pemilik modal sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan secara aktual dan menyeluruh dimiliki oleh *agent* sebagai pelaku yang mengelola perusahaan. Posisi, peran serta tujuan *principal* dan *agent* yang berbeda tersebut akan mengakibatkan konflik kepentingan (Eisenhardt, 1989). Hubungan *agensi* akan terus meningkat apabila

principal tidak mampu mengawasi kegiatan *agent* demi memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal* (Jansen dan Meckling, 1976).

Saat ini pemungutan pajak terus mengalami perlawanan dari wajib pajak baik secara aktif dan pasif (Surbakti, 2012). Tindakan untuk menghindari pajak secara langsung dari pemerintah (fiskus) merupakan perlawanan aktif. Sedangkan perlawanan pasif diberikan dari wajib pajak dengan cara mempersulit pemungutan pajak yang terkait dengan struktur ekonomi. Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah memaparkan tiga karakteristik dari praktik penghindaran pajak berupa adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seakan-akan terkandung di dalamnya walaupun sebenarnya tidak ada, menggunakan *loopholes* ketentuan dari UU atau menerapkan pengaturan legal untuk mencapai tujuan, meskipun bukan itu yang sesungguhnya dimaksudkan dalam UU dan para konsultan pajak memberitahukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukannya bebas dari biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain yaitu timbulnya masalah agensi. Masalah ini dapat muncul apabila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan

pribadinya, dimana manajer yang menggerakkan jalannya perusahaan termasuk menentukan tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Puspita, 2014). Adanya perbedaan kepentingan ini akan membawa potensi terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola oleh pemilik, disebut biaya keagenan. Biaya keagenan ini merupakan bentuk mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik dengan (1) biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal*, (2) biaya *bonding* yang dikeluarkan *agent*, (3) kerugian residual sebagai pengurang kekayaan *principal* (Jansen dan Meckling, 1976).

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen setidaknya 30 persen dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Seseorang yang menjabat sebagai komisaris independen dalam perusahaan harus memiliki kriteria seperti; tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan komisaris serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan.

Keberadaan komite audit memiliki peranan yang penting untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Kinerja yang efektif dari komite audit perusahaan dapat menjadi salah satu aspek penilaian dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Demi terciptanya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran harus menjadi landasan pokok bagi

kegiatan dan tanggung jawab komite audit (Effendi 2003:35). Surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit, anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang, anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen.

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat oleh eksekutif supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi dan Harto, 2014). Menurut Budiman dan Sutiyono (2012) menjelaskan bahwa preferensi risiko dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse* dengan cara mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan dapat diklasifikasikan dalam bermacam cara, seperti log total aset, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Handayani dan Wulandari, 2014).

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen. Ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih waspada untuk menentukan keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan (Ardyansah dan

Zulaikha, 2014). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Prakosa (2014) yang membuktikan proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak dimana jika komisaris independen mengalami peningkatan maka praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan sehingga proporsi komisaris yang besar dalam perusahaan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Komite audit sesuai perannya dapat membantu dewan komisaris agar asimetri informasi tidak terjadi dengan melakukan *monitoring* serta memberi pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian intern yang sedang berlangsung di dalam perusahaan. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dari pihak manajemen akan terjadi jika pengawasan semakin ketat dilakukan pada manajemen perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Hasil pengujian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) juga membuktikan komite audit mempunyai pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. Peningkatan kualitas GCG dalam perusahaan akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena semakin banyaknya keberadaan komite audit dalam perusahaan. Sesuai dengan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₂: Keberadaan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) dalam pengujian analisisnya menemukan hasil yang positif antara preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut dimungkinkan karena eksekutif perusahaan cenderung memiliki preferensi *risk taker* dengan keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Dewi dan Jati (2014), yaitu eksekutif dengan preferensi *risk taker* kemungkinan akan lebih berani dalam menentukan keputusan walaupun memiliki risiko yang besar. Sesuai dengan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H₃: Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Pernyataan tersebut didukung oleh Sari (2014) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap

tax avoidance dengan menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar lebih stabil dan dapat menghasilkan laba dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Sesuai dengan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2011 hingga 2013 dan telah memublikasikan data laporan keuangan tahunan melalui website www.idx.co.id. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui metode observasi *non participant*. Data yang diambil terdiri dari laporan keuangan tahunan yang merupakan data kuantitatif sedangkan nama-nama perusahaan manufaktur yang merupakan data kualitatif.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan pajak, namun tetap mengikuti ketentuan peraturan perpajakan seperti menggunakan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan serta memperlambat pembayaran pajak yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan saat ini. Penghindaran pajak dapat diukur *effective tax rate* (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak (Rodriguez dan Arias, 2012). Semakin besar nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. ETR dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta terhindar dari hubungan bisnis maupun hubungan lainnya yang akan memengaruhi kompetensinya untuk bertindak independen atau hanya demi tujuan perusahaan. Proporsi komisaris independenn diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Dewi dan Jati, 2013). Jumlah Komisaris Independen len dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots(2)$$

Komite audit adalah komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris demi membantu *monitoring* pada manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan pandangan mengenai masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern perusahaan. Keberadaan komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat di sebuah perusahaan (Hanum, 2013).

Preferensi risiko eksekutif adalah konsekuensi yang akan dimiliki oleh eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambil. Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini menggunakan risiko perusahaan dengan menghitung *Standard Deviation* dari EBITDA dibagi Total Aset (Paligorova, 2010). Perhitungan pengukurannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2 / (T - 1)}{\sum_{t=1}^T E}} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

E = EBITDA (*Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization*)/Total Asset

T = Total Sampel

t = tahun

Ukuran perusahaan merupakan faktor untuk mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam perusahaan besar, menengah, atau kecil. Perhitungan ukuran perusahaan dilakukan dengan cara *Ln* total aset yang dimiliki perusahaan (De Goerge *et al*, 2013). Perhitungan pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Size = Ln (\text{Total Asset}) \dots \dots \dots (4)$$

Seluruh perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2011-2013 dijadikan sebagai populasi penelitian ini. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian. *Multiple Linear Regression Analysis* digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan dengan variabel terikat yaitu penghindaran pajak. Analisis ini akan dilakukan dengan program SPSS 16.0 dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini memaparkan hasil seleksi sampel, dan menjelaskan semua hasil analisis yang digunakan serta interpretasinya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji

asumsi klasik, uji statistik F, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik t. Populasi dalam penelitian ini akan diseleksi dengan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sampel yang dipilih dapat mewakili populasi yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil proses eliminasi sampel dengan menggunakan *purposive sampling* ditunjukkan dalam Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2.
Hasil Eliminasi Sampel

No	Kriteria	Akumulasi Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di BEI selama tahun 2011-2013	135
2.	Laporan keuangan tahunan selama tahun 2010-2013 yang tidak terpublikasi secara berturut-turut	(7)
3.	Data tidak lengkap sesuai dengannyang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu harus memiliki komisaris independen dan komite audit.	(10)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(27)
5.	Perusahaan yang laporan keuangan tahunannya tidak berakhir per 31 Desember	(5)
6.	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing sebagai mata uang pelaporan di laporan keuangan tahunan	(33)
Jumlah Perusahaan Sampel		53
Tahun Pengamatan		3
Jumlah Amatan		159

Sumber: Data diolah, 2015

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 3 yang menggambarkan deskripsi sampel penelitian.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

		KI	KA	RISK	SIZE	ETR
N	Valid	159	159	159	159	159
	Missing	0	0	0	0	0
Rata-rata		0,3639	3,44	0,0142225	28,3347	0,24918
Standar Deviasi		0,04794	0,784	0,00678464	1,49339	0,025573
Minimal		0,25	2	0,00001	25,21	0,184
Maksimal		0,50	5	0,04010	31,99	0,311

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Tingkat penghindaran pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) perusahaan manufaktur memiliki *mean* 0,24918 dengan *standard deviation* sebesar 0,025573. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum ETR adalah perusahaan dengan kode SKLT yaitu sebesar 0,311 pada tahun observasi 2013 sedangkan nilai minimum ETR dimiliki oleh perusahaan dengan kode MERK sebesar 0,184 pada tahun observasi 2011.

Variabel independen proporsi komisaris independen (KI) memiliki *mean* 0,3639 dengan *standard deviation* sebesar 0,04794. Nilai maksimum proporsi komisaris independen sebesar 0,50 dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNVR dan SMCB pada tahun observasi 2011-2013 serta AISA dan SMGR pada tahun observasi 2012. Sedangkan nilai minimum proporsi komisaris sebesar 0,25 dimiliki oleh perusahaan dengan kode APLI dan TSPC pada tahun observasi 2012, ALMI pada tahun observasi 2011 serta TOTO pada tahun observasi 2012-2013.

Variabel independen keberadaan komite audit (KA) memiliki *mean* sebesar 3,44 dengan *standard deviation* sebesar 0,784. Nilai maksimum

keberadaan komite audit sebesar 5 dimiliki oleh perusahaan dengan kode APLI, BTON, JPRS, YPAS, dan MBTO pada tahun observasi 2011-2013 serta JPFA pada tahun observasi 2011-2012. Sedangkan nilai minimum keberadaan komite audit sebesar 2 dimiliki oleh perusahaan dengan kode TSPC, DVLA dan CEKA pada tahun observasi 2011-2013.

Variabel independen preferensi risiko eksekutif (*RISK*) memiliki *mean* sebesar 0,0142225 dengan *standard deviation* sebesar 0,00678464. Nilai maksimum preferensi risiko eksekutif sebesar 0,04010 dimiliki oleh perusahaan dengan kode MERK pada tahun observasi 2011 dan nilai minimum preferensi risiko eksekutif sebesar 0,0001 dimiliki oleh perusahaan dengan kode DLTA pada tahun observasi 2011.

Variabel independen ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki *mean* sebesar 28,3347 dengan *standard deviation* sebesar 1,49339. Nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 31,99 dimiliki oleh perusahaan dengan kode INDF pada tahun observasi 2013 sedangkan nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 25,21 dimiliki oleh perusahaan dengan kode ALMI pada tahun observasi 2011.

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak (Utama, 2009:11). Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,460. Dengan nilai tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0.05 maka nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih tinggi dari tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$)

sehingga kesimpulan yang didapat data penelitian ini mempunyai distribusi normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Parameter yang diuji	Uji Normalitas		Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas	Uji Autokorelasi
	Z	P	Tolerance	VIF	Sig.	DW
<i>Unstandardized Residual</i>	0,854	0,460				
KI			0,786	1,272	0,089	
KA			0,933	1,072	0,136	
<i>RISK</i>			0,952	1,051	0,791	
<i>SIZE</i>			0,797	1,255	0,327	
<i>Durbin – Watson</i>						1,704

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Uji multikolinearitas bertujuan untuk munguji apakah model regresi terdapat adanya indikasi berupa korelasi antar variabel bebasnya. Nilai *Tolerance* dan VIF digunakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas (Utama, 2009:94). Berdasarkan Tabel 4. memperlihatkan nilai *tolerance* untuk setiap variabel yang diujikan $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak saling berkorelasi dan menggambarkan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengalami ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatann lain atau tidak. Uji *Glejser* digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi. (Utama, 2009:106). Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi semua variabel yang diujikan tersebut berada diatas 5% sehingga dapat menunjukkan model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear tentang pengaruh data dari pengamatan sebelumnya. Cara *Durbin-Waston* digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi (Utama, 2009:102). Berdasarkan Tabel 4. memperlihatkan nilai *Durbin-Waston* (DW) sebesar 1,704 karena nilai DW berada diantara +2 dan - 2 maka nilai *Durbin-Waston* (DW) tidak berada pada daerah autokorelasi sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara serempak pada variabel terikat (Ghozali, 2011:98). Hasil pengujian statistik F ditunjukkan pada Tabel 5. berikut ini.

**Tabel 5.
Hasil Uji F**

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
<i>Regression</i>	0,023	4	0,006	11,290	0,000 ^a
<i>Residual</i>	0,080	154	0,001		
Total	0,103	158			

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5. memperlihatkan hasil perhitungan F_{hitung} sebesar 11,920 yang berarti lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,43. Model penelitian ini layak digunakan karena nilai signifikan $F_{hitung} = 0,000 < 0,05$ sehingga secara serempak variabel proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan dengan tujuan mengukur kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Ghozali, 2011:97). Hasil pengujian dapat ditunjukkan padaa Tabel 6. berikut ini.

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	,476 ^a	,227	,207	,022778	1,704

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6. memperlihatkan besarnya nilai *R-Square* sebesar 0,227 yang artinya 22,7 persen variabel independen mampu menerangkan variasi variabel dependen dan sisanya 77,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan setiap variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2011:98). Hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima jika variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi < nilai $\alpha = 5\%$. Berdasarkan Tabel 7. memperlihatkan bahwa secara parsial keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 7. berikut ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Statistik t

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant).	0,443	0,035		12,788	0,000		
	Proporsi Komisaris Independen	-0,045	0,043	-0,085	-1,059	0,291	0,786	1,272
	Keberadaan Komite Audit	-0,006	0,002	-0,192	-2,617	0,010	0,933	1,072
	Preferensi Risiko Eksekutif	-0,681	0,274	-0,181	-2,487	0,014	0,952	1,051
	Ukuran Perusahaan	-0,005	0,001	-0,302	-3,802	0,000	0,797	1,255

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Multiple Linear Regression Analysis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2011 hingga 2013. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 8. berikut ini.

Tabel 8.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
Konstanta	0,443	12,788	0,000
Proporsi Komisaris Independen	-0,045	-1,059	0,291
Keberadaan Komite Audit	-0,006	-2,617	0,010
Preferensi Risiko Eksekutif	-0,681	-3,802	0,000
Ukuran Perusahaan	-0,005	-2,487	0,014
<i>R Square</i> = 0,227		F = 11,290	
<i>Adj. R Square</i> = 0,207		Sig. = 0,000	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Model regresi yang terbentuk disajikan dalam Tabel. 8 dengan persamaannya dituliskan sebagai berikut ini.

$$Y = 0,443 - 0,045X_1 - 0,006X_2 - 0,0681X_3 - 0,005 X_4 + \varepsilon$$

Hipotesis Pertama (H_1) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Tabel 8. memperlihatkan bahwa koefisien regresi proporsi komisaris independen sebesar -0,045. Nilai tingkat signifikansi yaitu 0,291 lebih tinggi dari tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Hasil tersebut tidak mendukung H_1 maka proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti proporsi komisaris independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik penghindaran pajak. Kemungkinan peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2013), Agusti (2014), Fadhilah (2014) serta Annisa dan Kurniasih (2012).

Hipotesis Kedua (H_2) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Tabel 8. memperlihatkan bahwa koefisien regresi keberadaan komite audit -0,006. Nilai tingkat signifikansi yaitu 0,010 lebih rendah dari tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Hasil tersebut mendukung H_2 maka keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti komite audit yang bertugas melakukan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Rachmithasari (2015) serta Maharani dan Suardana (2014).

Hipotesis Ketiga (H_3) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Tabel 8. memperlihatkan bahwa koefisien regresi preferensi risiko eksekutif sebesar $-0,681$. Nilai tingkat signifikansi yaitu $0,014$ lebih rendah dari tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Hasil tersebut mendukung H_3 maka preferensi risiko eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti preferensi risiko eksekutif yang diindikasikan dengan tinggi rendahnya risiko perusahaan dapat mencerminkan preferensi risiko eksekutif perusahaan di dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal tetapi hanya pihak yang berani mengambil risiko yang akan melakukan hal tersebut, termasuk risiko yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Eksekutif perusahaan yang cenderung memiliki preferensi *risk taker* akan lebih berani dalam menentukan suatu kebijakan pajak perusahaan meskipun risikonya tinggi. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Budiman dan Setiyono (2012), Hanafi dan Harto (2014), Carolina, dkk. (2014) serta Singly dan Sukartha (2014).

Hipotesis Keempat (H_4) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Tabel 8. memperlihatkan bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar $-0,005$. Nilai tingkat signifikansi yaitu $0,000$ lebih rendah dari tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Hasil tersebut mendukung H_4 maka

ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola pajaknya karena perusahaan kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan pemerintah sehingga banyak batasan yang dimiliki perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2013), Darmadi dan Zulaikha (2013), Handayani dan Wulandari (2014) serta Richardson dan Lanis (2007).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan dari hasil analisis dan simpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran pada penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian, karena semakin panjang periode penelitian akan lebih valid. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sektor industri yang berbeda seperti saat ini perusahaan *property* dan *real estate*, pertambangan, perkebunan dan jasa keuangan yang menjadi target sasaran pengawasan ketat Direktorat Jendral Pajak.

Nilai *R-Square* dalam penelitian ini hanya sebesar 22,7 % sedangkan sisanya 77,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel yang berbeda dan memiliki kontribusi lebih besar dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Penelitian selanjutnya untuk pengukuran komite audit dapat menggunakan pengukuran lainnya yang lebih mencerminkan kompetensi komite audit dalam melaksanakan peran *monitoring* penyusunan laporan keuangan.

REFERENSI

- Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol. 2, No. 3.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Sebelas Maret*. Vol. 8, No.2, Hal 123-139.
- Ardyansah, Danis. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No. 2, Hal. 1-9.
- Budiman, Judi dan Sutiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Peninghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012*.
- Carolina, Verani, Maria, Natalia dan Debbianita. 2014. Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 18, No. 3, Hal. 409-412.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 4, Hal 1-12.

- De George., C. Ferguson, and N. Spear. 2013. How Much Does IFRS Cost? IFRS Adoption and Audit Fees. *The Accounting Review*. 88 (2).
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 2, Hal. 249-260.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governnace: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eisenhardt, KM. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14 (1), pp: 57-74.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perrusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol. 2, No. 1.
- Ghozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Guna, Welvin I dan Herawaty, Arleen. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No. 10, Hal. 53-68.
- Hanafi, Umi dan Harto, Puji. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No. 2, Hal. 1-11.
- Handayani, Desi dan Wulandari, Hesty. 2014. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 7, Hal. 1-10.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2, No. 2, Hal. 1-10.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*. *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development, 5 (18), pp: 22-27.

- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3 (4), pp: 305-360.
- Laporan Keuangan Tahunan. 2010–2013. www.idx.co.id.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Suardana, I Ketut Alit. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 2. Hal. 525-539.
- Maria, M. R, dan Kurniasih, Tommy. 2013. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Ekonomi dan Bisnis*. Vol.18, No. 1.
- Mulyani, Sri, Darminto dan Endang N.P, M.G WI. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 2, No. 1.
- Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi xvii*. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia. Hal. 1-27.
- Pratiwi, Dheara Arizona. Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target. www.economy.okezone.com (diunduh tanggal 25 Mei 2015).
- Puspita, Ratih Silvia. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Raharjo, Arko Soni dan Daljono. 2014. Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks *Corporate*

- Governance Terhadap Asimetri Informasi. Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No. 3, Hal. 1-13.
- Rego, Sonja Olhoft and Wilson, Ryan. 2009. Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness and Future Firm Performance. *Working Paper University of Lawa*.
- Richardson, G dan Lanis R. 2007. Determinants Of the variability In Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting And Public Policy*, 2 (6), pp: 689-704.
- Rodriguez, E., F. dan Arias, A., M. 2013. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*. 45 (6).
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol. 2, No. 3.
- Sartori, Nicola. 2008. *Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 10, No. 1, Hal. 47- 62.
- Utama, Made Suyana. 2009. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Ying, Zing. 2011. Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness. *Thesis of Lingnan University*.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.